

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia membagi struktur perekonomian menjadi empat kelompok badan usaha, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Koperasi serta pelaku ekonomi berskala kecil atau UKM. Dengan demikian pemerintah berharap agar semua kekuatan ekonomi nasional tersebut dapat berkembang menjadi komponen yang saling mendukung dan dapat meningkatkan kesejahteraan secara merata sehingga lebih dapat terintegrasi dalam sistem perekonomian nasional. (Nasra, Zuraidah, & Fani 2019).

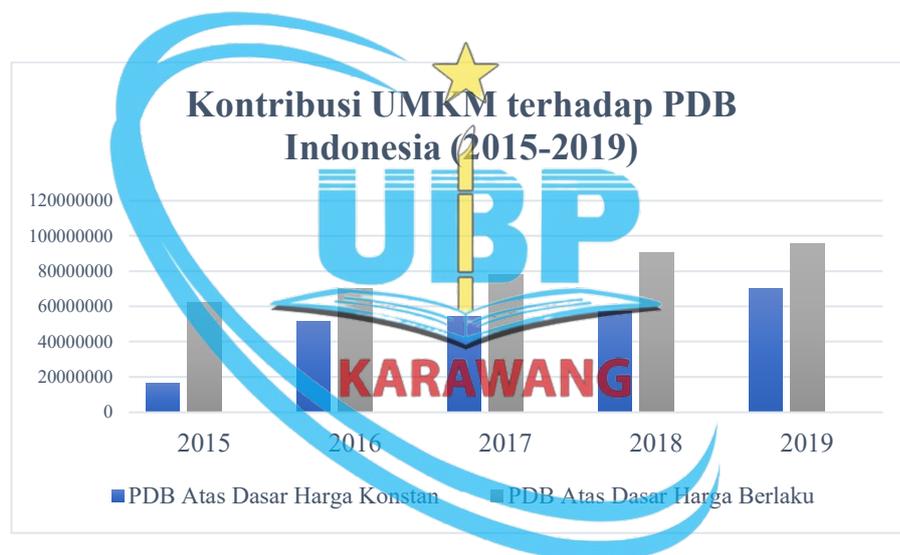
Tidak bisa dipungkiri bahwa usaha kecil dan menengah sangat memegang peranan penting dalam mendongkrak perekonomian suatu negara, begitu juga dengan Indonesia. Sejak badai krisis keuangan tahun 1996, justru usaha kecil dan menengah yang dapat bertahan sampai sekarang. Ini dikarenakan bahwa UKM tidak banyak bergantung pada modal besar dan pinjaman mata uang asing (Sujarweni, 2019:14). Tingginya perhatian para pelaku UKM tidak lain adalah untuk menopang perekonomian rakyat. Selain itu juga UKM secara langsung dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di sektor bawah serta penyediaan lapangan tenaga kerja. Berikut grafik perkembangan UKM di Indonesia periode tahun 2016 hingga 2019 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dari website resmi Databoks.



**Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah UKM di Indonesia Periode 2016-2019**

Sumber: Databoks 2021 (Diolah Peneliti, 2022)

Pada Gambar 1.1 Badan Pusat Statistik (2021) menyatakan bahwa Indonesia mempunyai 65,5 juta UKM, dengan ini jumlah tersebut meningkat dalam persentase 1,98% daripada periode tahun sebelumnya sebanyak 64,2 juta unit usaha. BPS juga menjelaskan secara rinci pada periode tahun 2019 jumlah Usaha Mikro mencapai 64,6 juta, Usaha Kecil mencapai 798,7 ribu unit serta Usaha Menengah mencapai 65,5 ribu unit usaha. Dapat dikatakan bahwa jumlah UKM di Indonesia setara dengan 99,99% dari total keseluruhan unit usaha. UKM juga dapat menyerap sumber daya manusia di Indonesia dengan total 119,6 juta jiwa, angka tersebut meningkat daripada periode tahun sebelumnya yang berjumlah 116,9 juta jiwa. (Databox: BPS, 2021). Selanjutnya, UMKM juga mampu memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) atas harga konstan maupun atas harga berlaku, kontribusi UMKM sebanyak 57,14%.

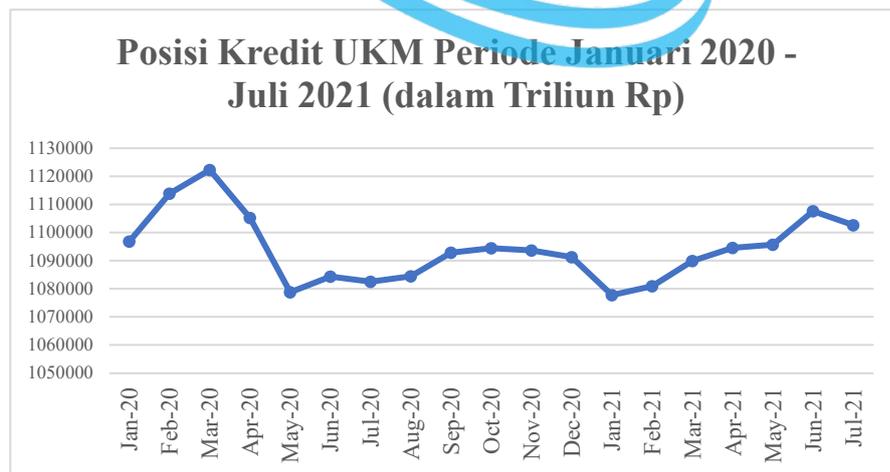


**Gambar 1.2 Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia Periode 2015-2019**

Sumber: Databoks, 2021 (Diolah Peneliti, 2022)

Pada Gambar 1.2 menjelaskan bahwa kontribusi usaha mikro, kecil dan menengah terhadap produk domestik bruto (PDB) terus meningkatkan dari tahun ke tahun. Kontribusi UMKM pada tahun 2019 terhadap PDB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 7.034,1 triliun naik 22,9% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 5.721,1 triliun. Selanjutnya dilihat dari kontribusi UMKM terhadap PDB atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 sebesar Rp. 9.580,8 triliun naik signifikan di angka 5,7% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 9.062,6 triliun. Kontribusi ini naik besar dikarenakan mayoritas unit usaha di Indonesia terdapat pada UMKM. (Databoks: Kementrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 2021).

Sektor keuangan merupakan salah satu sektor terpenting bagi perekonomian Indonesia. Untuk mendorong peran sektor keuangan dalam pertumbuhan ekonomi, salah satu upaya yang dapat dilakukan bank sebagai lembaga jasa keuangan adalah dengan memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan. Bank Umum Konvensional (BUK) dengan kegiatan usaha yang lebih beragam dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan kegiatan usaha yang relatif terbatas sama-sama berperan dalam memperluas akses keuangan bagi seluruh elemen masyarakat hingga ke pelosok, termasuk sektor usaha mikro. Usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai salah satu bidang yang memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai penggerak perekonomian, UKM membutuhkan berbagai dukungan terutama dari segi permodalan. Jumlah unit UKM di Indonesia saat ini tercatat lebih dari 60 juta unit. Jumlah yang sangat besar ini tentunya menjadi potensi yang besar bagi perkembangan penyaluran kredit perbankan. Dengan potensi yang sangat besar tersebut, bank umum wajib menyalurkan kredit kepada pelaku usaha yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.17/12/PBI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.14/22/PBI/2012 tanggal 26 Juni 2015 Diatur Perkreditan Bank Umum atau pembiayaan dan bantuan teknis untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang membutuhkan bank umum untuk memberikan pinjaman kepada UKM. Grafik berikut ini menggambarkan posisi kredit UKM di Indonesia periode bulan Januari 2020 hingga bulan Juli 2021.



**Gambar 1.3 Posisi Kredit UKM Periode Januari 2020-Juli 2021**

Sumber: Databoks 2021 (Diolah Peneliti, 2022)

Dari Gambar 1.3 menjelaskan bahwa kredit Bank Umum untuk usaha mikro, kecil dan menengah pada bulan Juli 2021 sebesar Rp. 1.102,66 triliun. Nilai tersebut turun 0,45% daripada bulan sebelumnya yaitu Juni 2021 yang sebesar Rp. 1.107,59 triliun. Jika dibandingkan dengan periode bulan Juli 2020, kredit UKM masih menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan sebesar 1,86%. Demikian juga dengan periode bulan Desember 2020 dimana kredit UKM masih tumbuh di angka 1,05%. (Databoks: Bank Indonesia, 2021).

Di dalam prosedur penyaluran kredit dari bank maupun lembaga keuangan lain kepada para pelaku UKM sangat ketat dan butuh waktu lama. Analisis kredit bank memberikan kredit kepada calon nasabah harus mempertimbangkan 5C dari calon penerima kredit, yaitu *Character, Capacity, Capital, Colletoral*, dan *Condition* (W. Sujarweni, 2017:169).

Sebelum prosedur kredit disalurkan, pihak lembaga keuangan juga akan mempertimbangkan aset kekayaan yang dimiliki pelaku UKM yang nantinya akan menerima kredit. Hal ini dapat memberikan gambaran atau acuan pihak bank dalam kelayakan untuk penyaluran kredit. Aset merupakan faktor penting bagi pelaku UKM, karena aset adalah modal jangka panjang untuk suatu usaha. Oleh karena itu adanya aset yang memadai akan sangat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan suatu usaha. Dengan usaha yang lancar maka diharapkan pendapatan pun akan semakin meningkat.

Desa Jatibaru merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang dengan total jumlah penduduk sebanyak 5.459 jiwa dan 1.849 Kepala Keluarga. Perkembangan UMKM di desa Jatibaru terus meningkat, akan tetapi masih terdapat masalah dalam upaya memajukan prospek usahanya yaitu masalah permodalan. Permasalahan tersebut sesuai dengan yang dinyatakan oleh W. Sujarweni (2019:11) bahwa permasalahan secara umum yang dihadapi oleh pedagang kecil antara lain sulitnya dalam hal permodalan, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan teknologi dan pengetahuan pelaku usaha, kesulitan mencari bahan baku, keterbatasan dalam pemasaran dan promosi, serta masih merasa ragu untuk kerjasama dengan perusahaan besar. Sehingga dalam hal ini masyarakat khususnya pelaku UMKM membutuhkan bantuan permodalan dapat berupa pinjaman atau kredit yang biasanya dapat diperoleh di suatu lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Namun, dalam hal ini masih banyak pelaku UKM yang mengalami kesulitan dalam mengajukan pinjaman dana kepada pihak bank baik dari syarat yang tidak dapat dipenuhi atau faktor lainnya.

Pemilik UMKM yang ada di desa Jatibaru, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang mempunyai tiga bidang bisnis usaha yaitu pertanian atau musiman, perdagangan dan kontrakan. Adapun bagian dari pelaku UMKM desa Jatibaru terdapat pada tabel 1.1 dibawah ini.

**Tabel 1.1**

**Bidang-bidang Usaha Pada Pelaku UMKM di desa Jatibaru**

No	Bidang Usaha	Jumlah Pelaku UMKM
1	Pertanian atau musiman	2.279 Orang
2	Perdagangan	120 Orang
3	Kontrakan	2 Orang
<b>Total</b>		<b>2.401 Orang</b>

Sumber: Profil Desa Jatibaru (Diolah Peneliti, 2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas terdapat tiga bidang usaha yang ada di desa Jatibaru yaitu pertanian atau musiman sebanyak 2.279 orang, perdagangan sebanyak 120 orang, dan kontrakan 2 orang. Maka dari ketiga bidang tersebut penulis memilih fokus melakukan penelitian pada bidang perdagangan atau UMKM karena mempunyai keinginan untuk mengetahui, menganalisa serta menjelaskan pengaruh dari pemberian kredit dan total aset terhadap pendapatan. Berdasarkan hasil *survey* pendahuluan, dapat diketahui bahwa awal mula kepemilikan aset, penyaluran kredit yang diterima, serta beberapa UMKM mengalami penurunan dalam pendapatannya dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 1.2**

**Total Aset, Jumlah Pendapatan Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit**

No	Jenis Usaha	Total Aset UMKM (Rp)	Jumlah Pendapatan Sebelum Kredit (Rp/Bulan)	Jumlah Pendapatan Sesudah Kredit (Rp/Bulan)
1	Toko sembako	Rp. 10.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 5.000.000
2	Toko sembako	Rp. 5.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 5.000.000

3	Toko sembako	Rp. 2.000.000	Rp. 3.000.000	Rp. 2.600.000
4	Toko sembako	Rp. 2.000.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.000.000
5	Toko grosir	Rp. 100.000.000	Rp. 90.000.000	Rp. 100.000.000
6	Toko grosir	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	Rp. 120.000.000
7	Warung kebab	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
8	Warung seblak	Rp. 2.000.000	Rp. 3.500.000	Rp. 5.000.000
9	Toko bangunan	Rp. 50.000.000	Rp. 25.000.000	Rp. 26.000.000
10	Toko bangunan	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
11	Fotocopy Yanto	Rp. 1.000.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.300.000
12	Toko Elektronik	Rp. 130.000.000	Rp. 120.000.000	Rp. 120.000.000
13	Toko kue basah	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 2.200.000
14	Baso "barokah"	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 35.000.000
15	Baso sadun	Rp. 4.000.000	Rp. 6.000.000	Rp. 5.500.000
16	Toko kue "fanny"	Rp. 50.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 27.500.000
17	Kuliner nasi goreng	Rp. 20.000.000	Rp. 6.000.000	Rp. 6.200.000
18	Gas LPG 3kg	Rp. 100.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 12.000.000

Sumber: Data diolah peneliti, 2022.

Hasil *survey* pendahuluan pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa ternyata aset yang dimiliki oleh pelaku usaha kecil sebesar Rp. 1.000.000 – Rp. 20.000.000 sedangkan aset yang dimiliki oleh pelaku usaha menengah sebesar Rp. 30.000.000 – lebih dari Rp. 80.000.000. Jika dilihat pada penegasan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah maka tidak ditemukan kriteria pembagian usaha berdasarkan jumlah kekayaan. Melihat situasi seperti ini, modal yang dikeluarkan diakibatkan aset yang dimiliki oleh pelaku UMKM tidak cukup besar. Sementara pelaku UMKM jelas membutuhkan modal yang besar dengan tujuan untuk perkembangan aset dan membutuhkan modal pinjaman atau kredit dalam rangka mempertahankan serta mengembangkan usaha.

*Survey* pendahuluan juga memperlihatkan hasil adanya penurunan pendapatan pada beberapa UMKM setelah mendapatkan penyaluran kredit. Hal ini terjadi karena modal yang didapat dalam penyaluran kredit masih cukup kecil sehingga tidak terlalu membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha, selain itu juga kredit yang disalurkan tidak sepenuhnya digunakan untuk modal usaha. Melihat kondisi tersebut, maka hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dihasilkan oleh Mochtar (2019) semakin banyak kredit yang disalurkan maka dapat dimanfaatkan baik oleh pelaku UKM untuk modal usaha selain itu KUR yang diajukan oleh nasabah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan usahanya.

Menurut Meilinda & Mahmud (2020) bahwa total aset berpengaruh terhadap pendapatan. Artinya, semakin besar aset yang dimiliki oleh pelaku UKM maka semakin besar pula pendapatan yang dihasilkan dan sebaliknya semakin rendah aset maka semakin rendah pula pendapatan UKM karena aset dapat digunakan untuk mendukung usaha juga sangat berperan untuk meningkatkan tingkat pendapatan. Selanjutnya menjelaskan juga bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh terhadap pendapatan UKM. Semakin besar jumlah kredit yang disalurkan maka semakin tinggi pula pendapatan yang dihasilkan oleh pelaku UKM, sehingga tujuan KUR dapat tercapai sebagai kredit modal dan investasi untuk mempercepat pengembangan sektor primer dan memberdayakan usaha kecil, meningkatkan aksesibilitas kredit dan institusi keuangan, mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja. Hal ini sejalan dengan tujuan keberadaan KUR yaitu untuk meningkatkan perekonomian, mengurangi kemiskinan, serta penyerapan sumber daya manusia. Selanjutnya hasil penelitian dari Mochtar (2019) berpendapat bahwa pemberian kredit berpengaruh terhadap pendapatan, semakin banyak kredit usaha rakyat yang disalurkan kepada nasabah maka dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku UKM untuk modal usaha selain itu pemberian KUR yang diajukan oleh nasabah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan usahanya.

Penelitian dari Pitoyo (2014) berpendapat bahwa pemberian kredit secara parsial berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang kecil. Jadi pedagang kecil yang bisa mendapatkan kredit dengan lancar maka mereka akan dapat mengembangkan usahanya dengan baik sehingga hal ini dapat meningkatkan pendapatan. Pitoyo juga mengatakan bahwa aset secara parsial berpengaruh positif terhadap pendapatan karena dengan aset yang memadai akan mempengaruhi kelancaran dan kesuksesan usaha. Dengan usaha yang lancar tentunya akan meningkatkan pendapatan.

Sementara itu, hasil penelitian menurut Devina, & Lusi (2020) bahwa pemberian kredit secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan UMKM ini dikarenakan ada beberapa pelaku usaha yang sudah stabil dalam segi keuangannya, sehingga kredit yang diberikan bukanlah modal utama untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya menurut Wardiningsih, & Susanti (2017) mengatakan bahwa aset secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap laba UKM ini disebabkan karena pengelolaan aset yang dilakukan masih belum optimal serta pengeluaran untuk aset tidak sebanding dengan kegiatan produksi sehingga keuntungan yang diperoleh UKM menjadi kurang optimal.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemberian Kredit dan Total Aset Terhadap Pendapatan UMKM di Desa Jatibaru Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang.”

## 1.2 Identifikasi Masalah

Proses identifikasi masalah pada penelitian ini diawali dengan wawancara secara langsung kepada pemilik UMKM serta dari penjelasan latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah-masalah yang terkait adalah sebagai berikut.

1. Keterbatasan permodalan pelaku UMKM desa Jatibaru.
2. Terjadi *research* GAP pada penelitian terdahulu terkait pengaruh pemberian kredit terhadap pendapatan UMKM.
3. Terjadi *research* GAP pada penelitian terdahulu terkait pengaruh total aset terhadap pendapatan UMKM.
4. Terjadi fluktuasi naik turunnya posisi penyaluran kredit UKM periode Januari 2020- Juli 2021 di Indonesia.
5. Aset yang dimiliki pelaku UMKM masih belum optimal, sehingga banyak aset yang digunakan belum tepat sasaran.
6. Sistem pencatatan keuangan UMKM masih manual dan belum cukup baik, ini dapat menghambat pemberian kredit karena persyaratan yang belum bisa dipenuhi secara lengkap.
7. Kehati-hatian kreditur dalam memberikan kredit dengan melihat kondisi ekonomi calon debitur.
8. Keterbatasan sumber daya manusia, teknologi dan informasi serta sulitnya pemasaran *online* menjadi penghambat berjalannya usaha.

9. Kecilnya tempat usaha menjadi penilaian *minus* dari kreditur, sehingga menghambat pemberian kredit UMKM.
10. Terjadi fluktuasi hasil pendapatan beberapa pelaku UMKM di Desa Jatibaru.
11. Pendapatan berpengaruh terhadap tingkat belanja UMKM. Apabila pendapatan yang dihasilkan kurang baik maka akan berdampak buruk pada belanja bahan baku atau produk penjualan yang menyebabkan UMKM kekurangan persediaan penjualan.

### 1.3 Batasan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan, maka peneliti perlu melakukan pembatasan masalah yang akan di teliti. Adapun pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini berada dalam kajian bidang ilmu manajemen khususnya di bidang keuangan.
2. Penelitian ini bersifat mengkaji dan menjelaskan Pengaruh Pemberian Kredit Dan Total Aset Terhadap Pendapatan UMKM di Desa Jatibaru, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang.
3. Tempat penelitian ini adalah para pelaku UMKM di Desa Jatibaru yang terdaftar sebagai penerima kredit pada lembaga keuangan bank dan non bank.
4. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif verifikatif.
5. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *software* SPSS 22.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dalam identifikasi masalah diatas maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana gambaran deskriptif pemberian kredit UMKM di Desa Jatibaru?
2. Bagaimana gambaran deskriptif total aset UMKM di Desa Jatibaru?
3. Bagaimana gambaran deskriptif pendapatan UMKM di Desa Jatibaru?
4. Bagaimana pengaruh pemberian kredit terhadap pendapatan UMKM di Desa Jatibaru?
5. Bagaimana pengaruh total aset terhadap pendapatan UMKM di Desa Jatibaru?
6. Bagaimana pengaruh pemberian kredit dan total aset terhadap pendapatan UMKM di Desa Jatibaru?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh antara pemberian kredit dan aset terhadap pendapatan UMKM. Secara khususnya, penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui, menganalisa dan menjelaskan bagaimana gambaran pemberian kredit UMKM di Desa Jatibaru.
2. Untuk mengetahui, menganalisa dan menjelaskan bagaimana gambaran total aset UMKM di Desa Jatibaru.
3. Untuk mengetahui, menganalisa dan menjelaskan bagaimana gambaran pendapatan UMKM di Desa Jatibaru.
4. Untuk mengetahui, menganalisa dan menjelaskan bagaimana pengaruh pemberian kredit terhadap pendapatan UMKM di Desa Jatibaru.
5. Untuk mengetahui, menganalisa dan menjelaskan bagaimana pengaruh total aset terhadap pendapatan UMKM di Desa Jatibaru.
6. Untuk mengetahui, menganalisa dan menjelaskan bagaimana pengaruh pemberian kredit dan total aset terhadap pendapatan UMKM di Desa Jatibaru.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain sebagai berikut :

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi yang baik dalam mengembangkan penelitian yang berhubungan dengan pengaruh aset dan pemberian kredit terhadap pendapatan UMKM secara lebih luas lagi.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penilaian baik bagi para pelaku usaha maupun masyarakat yang akan mulai mendirikan usahanya dengan adanya kepemilikan aset dan penyaluran kredit.

